

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Strategi

Istilah strategi bermacam-macam, secara umum strategi dikaitkan dengan rangkaian cara untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut Chandler, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan, dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.¹ Selanjutnya menurut Stephane K. Marrus, strategi di definisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.²

Selain itu Hamel dan Prahalad mendefinisikan strategi secara lebih khusus yaitu strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi bukan dari apa yang terjadi.³

¹ Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 16.

² *Ibid.*,

³ Husein Umar, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 32.

Secara konseptual, strategi juga sering diartikan dengan beragam pendekatan, di antaranya:⁴

- a. Strategi sebagai suatu rencana, strategi merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan sebuah kegiatan demi tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan.
- b. Strategi sebagai suatu kegiatan, strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi, atau perusahaan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan.
- c. Strategi sebagai suatu instrumen, strategi merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur pimpinan organisasi sebagai pedoman sekaligus alat pengendali pelaksana kegiatan.
- d. Strategi sebagai suatu sistem, strategi merupakan satu kesatuan rencana dan tindakan yang komprehensif dan terpadu yang diarahkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Strategi sebagai pola pikir, merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh wawasan yang luas tentang keadaan internal dan eksternal dalam jangka panjang.

Sebuah perusahaan atau organisasi tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, tentu sebuah perusahaan atau organisasi harus memiliki cara, langkah-langkah, serta rencana

⁴ Totok Mardikanto dan Perwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: ALFABETA, 2017), hal. 167-168.

strategis agar capaiannya mampu maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. Cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan ini dapat berbentuk sebuah program-program, kebijakan, maupun keputusan.

Cara atau langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi. Di mana ia menjadi pedoman bagi suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan setiap aktivitas perusahaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Litani bahwa strategi merupakan penentuan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengoordinasi aktivitas, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah.⁵

Strategi juga mempunyai ciri-ciri, sebagaimana di kemukakan oleh Kuncoro ciri-ciri sebuah strategi yang utama antara lain:⁶

- a. *Goal directed Action*, yaitu aktivitas yang menunjukkan apa yang diinginkan organisasi dan bagaimana mengimplementasikannya.
- b. Mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber daya dan kapabilitas), serta memperhatikan peluang dan tantangan.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu rangkaian keputusan, rencana, dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan sebuah organisasi untuk mencapai sasaran atau tujuan dari organisasi tersebut. Strategi merupakan suatu proses yang penting dan

⁵ Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), hal. 1.

⁶ *Ibid.*, hal. 1.

diperlukan karena kaitannya dengan pelaksanaan dan pengendalian aktivitas yang dilakukan guna memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan.

2. Proses Strategi

Sebagaimana dalam konsep strategi, bahwa strategi merupakan suatu rangkaian rencana kerja suatu organisasi. Dalam suatu rangkaian tersebut tentu memiliki sebuah proses hingga output nya yaitu berupa tindakan, begitu juga dengan strategi. Menurut Fred R. David proses strategi terdiri dari tiga tahapan, antara lain:⁷

a. Perumusan strategi

Perumusan dilakukan dengan proses penyusunan langkah kemajuan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan dalam menyediakan *customer value* terbaik. Teknik perumusan strategi yang penting dapat dipadukan menjadi kerangka kerja:

1) Tahap input

Dalam tahap ini segala bentuk informasi diringkas sebagai masukan awal dan sebagai dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi.

2) Tahap pencocokan

Dalam tahap ini proses yang dilakukan adalah memfokuskan pada strategi serta alternatif apa yang layak digunakan dengan memadukan faktor eksternal dan internal.

⁷ Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), hal. 3.

3) Tahap keputusan

Merupakan tahap menentukan satu macam teknik, yang merupakan hasil dari input sasaran serta mengevaluasi strategi alternatif yang telah diidentifikasi dalam tahap dua.

b. Perencanaan Tindakan

Langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikan strategi yang dilakukan dengan membuat perencanaan strategi. Dalam tahap ini bagaimana membuat rencana pencapaian dan kegiatan yang benar-benar sesuai arahan dan strategi yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan yang harus dilakukan.

c. Implementasi strategi

Implementasi strategi merupakan proses di mana strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Implementasi adalah kunci sukses manajemen strategi. Tahap ini adalah tahap yang paling sulit karena memerlukan komitmen dan kedisiplinan serta pengorbanan yang tinggi.

d. Evaluasi strategi

Tahap akhir dalam strategi adalah evaluasi strategi. Ada tiga macam aktivitas untuk melakukan strategi yaitu⁸:

- 1) Meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi.
- 2) Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan).

⁸ Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), hal. 5.

- 3) Mengambil tindakan korektif, tidak berarti strategi yang sudah ada akan ditinggalkan atau strategi bahkan dirumuskan. Sehingga dalam tahap akhir yaitu evaluasi strategi ada tiga hal yang harus dilakukan, yaitu harus dilihat faktor eksternal dan juga internal. Lalu mengukur antara realita dengan harapan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah mengambil tindakan koreksi, yaitu strategi tidak harus ditinggalkan namun bisa dirumuskan kembali.

3. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.⁹ Pengertian ini selaras dengan pendapat Djohani yang mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) adalah suatu proses memberikan daya kepada pihak yang lemah, dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga tercipta keseimbangan.¹⁰

Pengertian tersebut menekankan bahwa pemberdayaan merupakan proses memberikan wewenang atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mereka mampu mengatur kehidupannya. Namun selain itu, di dalam konsep pemberdayaan juga terdapat proses pendidikan

⁹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 79

¹⁰ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hal. 49.

untuk meningkatkan kualitas diri sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, dan mampu hidup mandiri.

Sebagaimana yang diungkapkan Sumodiningrat bahwa pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki akses terhadap sumber daya serta mampu memajukan dan mengembangkan usahanya sehingga tercapai perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.¹¹

Selanjutnya menurut Ife, pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat.¹²

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat tersebut, Winarni menambahkan bahwa konsep pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu: pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Berdasarkan konsep tersebut, pemberdayaan masyarakat tidak hanya bermakna pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dan dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.¹³

¹¹ Totok Mardikanto dan Perwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: ALFABETA, 2017), hal. 52.

¹² Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hal. 49.

¹³ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 79

Dari beberapa definisi pemberdayaan yang disampaikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, memiliki daya saing, dan mandiri. Termasuk di dalam proses atau usaha tersebut adalah dengan pemberian pengetahuan, pemberian motivasi, penyuluhan, pengadaan pelatihan-pelatihan, serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemandirian.

4. Prinsip Pemberdayaan

Dalam melaksanakan pemberdayaan, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan sehingga pemberdayaan dapat dilakukan dengan baik dan benar. Berdasarkan hakikat dan konsep pemberdayaan, maka dapat diuraikan beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat antara lain;¹⁴

- a. Aktivitas pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi subjek pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dimulai dengan menumbuhkan kesadaran akan potensi serta kebutuhan yang dibutuhkan subjek pemberdayaan.
- b. Pemberdayaan harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, karena pemberdayaan merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu.

¹⁴ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hal. 58-60.

- c. Pendampingan dan pembinaan harus dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan mengingat subjek pemberdayaan memiliki keragaman karakter, kebiasaan, dan budaya.
- d. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- e. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada subjek pemberdayaan sebagai bekal menuju kemandirian.
- f. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia.
- g. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat (agen pemberdayaan) yang memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup dan dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.

5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu proses belajar hingga tercapai sebuah kemandirian. Kemandirian yang telah dicapai kemudian harus dijaga dengan cara melakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara berkelanjutan agar tidak mengalami kemunduran. Proses belajar guna mencapai kemandirian ini tentunya dilakukan secara bertahap.

Suharto menyampaikan beberapa indikator dalam pemberdayaan antara lain:¹⁵

- a. Merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif,
- b. Memperbaiki kehidupan masyarakat,
- c. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan
- d. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Dalam upaya mencapai indikator dalam pemberdayaan tersebut, beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh dalam proses pemberdayaan yang pertama, meningkatkan akses ke dalam aset produksi. Dan yang kedua yaitu dengan memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.

Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan pemberdayaan di antaranya:¹⁶

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju kesadaran dan kepedulian akan pentingnya peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahapan awal di mana aktor pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi agar dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan guna menambah wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat berperan dalam pembangunan. Pada

¹⁵ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hal. 49.

¹⁶ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 79

tahap kedua ini masyarakat belajar tentang pengetahuan dan kecakapan – keterampilan yang memiliki hubungan dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Masyarakat memberikan partisipasi pada tingkat yang rendah, yakni sebagai objek pembangunan.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan – keterampilan sehingga terbuka inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kemandirian.

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai konsep strategi dan pemberdayaan, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan merupakan suatu rangkaian perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan atau sasaran dari proses pemberdayaan. Strategi atau pendekatan-pendekatan dalam pemberdayaan perlu dirancang agar proses pelaksanaan pemberdayaan lebih sistematis, terencana, dan sesuai dengan keadaan objek yang akan di berdayakan.

Mardikanto dan Soebiato menyampaikan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai tiga arah, antara lain:¹⁷

- a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan partisipasi masyarakat.

¹⁷ Totok Mardikanto dan Perwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: ALFABETA, 2017), hal. 168

- c. Modernisasi melalui penajaman ke arah perubahan struktur sosial ekonomi yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan pada masyarakat modern yang telah maju dapat dilakukan dengan cara penciptaan iklim yang menunjang peluang untuk tetap maju. Dengan menanamkan pengertian bahwa suatu saat wajib membantu yang lain agar lebih maju. Sedangkan pemberdayaan masyarakat yang masih tertinggal tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, usaha yang sama, dan modal saja melainkan harus diajak kerja sama dan kemitraan yang erat antara yang lebih maju dan yang lemah.¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses berkelanjutan. Di mana pemberdayaan dilakukan pada masyarakat ekonomi lemah dengan pemberian dorongan, pembinaan, serta pendampingan usaha agar tercipta masyarakat yang mandiri. Setelah masyarakat mengalami perubahan dan lebih mandiri, pemberdayaan tetap harus dilakukan guna mempertahankan perubahan serta meningkatkan sifat kreatif dan inovatif masyarakat.

B. Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia merujuk pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

¹⁸ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 191-192.

Menengah. Pengertian UMKM yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20, sebagai berikut:¹⁹

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Selain itu dalam Bab 3 pasal 4, juga dijelaskan mengenai kriteria-kriteria usaha mikro kecil dan menengah antara lain:²⁰

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

¹⁹ Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 115-116.

²⁰ *Undang-undang UMKM (UU RI No. 20 Tahun 2008)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 7-8.

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai dengan paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati.
- b. Memiliki penjualan tahunan lebih dari 300.000.000,00 (tiga ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00

Kriteria usaha menengah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati.
- b. Memiliki penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00

Dalam mendefinisikan dan memberikan kriteria UMKM masing-masing institusi memiliki pendapat yang berbeda. Adapun definisi UMKM menurut beberapa institusi yang ada di Indonesia antara lain:²¹

²¹ Anggota IKAPI, *Memfaatkan Koperasi dan UMKM: Tindak Lanjut Program PKH PNFI*, (Bandung : April Media, 2011), hal. 26.

Tabel 2.1
Kriteria UMKM Menurut Beberapa Organisasi

Organisasi	Jenis Usaha	Keterangan Kriteria
Badan Pusat Statistik (BPS)	Usaha Mikro	Pekerja < 5 orang termasuk tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar
	Usaha Kecil	Pekerja 5-19 orang
	Usaha Menengah	Pekerja 20-99 orang
Meneg Koperasi & PKM	Usaha Kecil (UU No. 9/1995)	Aset < Rp. 200 Juta di luar tanah dan bangunan, omzet < 1 Milyar
	Usaha Menengah (Inpres 10/1999)	Aset Rp. 200 – Rp. 10 Milyar
Bank Indonesia	Usaha Mikro (SK Dir BI No. 31/24/KEP/DIR tanggal 5 Mei 1998)	Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. dimiliki oleh keluarga, ember daya lokal, dan teknologi sederhana
	Usaha Kecil (UU No. 9/1995)	Aset < Rp. 200 Juta diluar tanah dan bangunan, omzet < 1 Milyar
	Menengah (SK Dir BI No. 30/45/DIR/UK tanggal 5 Januari 1997)	Aset < Rp. 5 Milyar untuk sektor industri Aset < 600 Juta diluar tanah dan bangunan
Bank Dunia	UMKM	Pekerja < 20 orang

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah merupakan sektor usaha yang cenderung memiliki kelemahan pada beberapa bidang seperti permodalan, SDM, pemasaran, teknologi, dan lain-lain. Oleh karena itu peran serta dari berbagai pihak terkait sangat dibutuhkan guna menciptakan kemandirian dalam menjalankan usaha.

2. Kelebihan dan Kelemahan UMKM

Salah satu keunggulan UMKM yang tidak dapat dipungkiri adalah kemampuan bertahannya dalam menghadapi badai krisis, di mana sektor usaha kecil ini tetap mampu menopang perekonomian Indonesia di sisi lain usaha besar yang sedang mengalami *collaps*. Keunggulan UMKM dalam bertahan dari badai krisis ini juga diungkapkan oleh CIDES (*Center for Information and Development Studies*) dalam artikel “Dampak Kenaikan Harga BBM pada sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Indonesia”. Menurut CIDES terdapat tiga keunggulan UMKM lainnya, yaitu:²²

- a. Pada umumnya UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.
- b. UMKM tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya.
- c. Pada umumnya bisnis UMK menggunakan modal sendiri atau tidak ditopang pinjaman bank. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMKM juga masih memiliki berbagai kelemahan yang menyebabkan sektor UMKM belum

²² BPS Prov. Jawa Timur, *Analisis Hasil SE2016-Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Jawa Timur*, (PT Sinar Murni Indoprinting, 2018), hal. 5

mampu untuk berkembang secara optimal. Secara spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil, antara lain:²³

- a. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
- b. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
- c. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
- d. Keterbatasan jaringan usaha kerja sama antar pengusaha kecil (sistem informasi pasar).
- e. Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan.
- f. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

C. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas di bidang pengembangan koperasi dan usaha mikro. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pemberdayaan, pemerintah menempati posisi sebagai penyuluh atau fasilitator. Secara konvensional, peran fasilitator hanya terbatas pada kewajibannya untuk menyampaikan inovasi serta mempengaruhi objek pemberdayaan sampai mereka sadar dan mampu mengadopsi inovasi yang disampaikan. Namun dalam perkembangannya,

²³ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2003), hal. 39.

fasilitator juga harus mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan, mengembangkan kebutuhan untuk melakukan perubahan-perubahan, serta memantapkan hubungan dengan objek pemberdayaan.²⁴

Selain itu, Mardikanto juga menyampaikan beberapa peran pemerintah sebagai penyuluh/fasilitator pemberdayaan, antara lain;²⁵

- 1) *Peran edukasi*, yaitu berperan sebagai pendidik dalam mengembangkan proses belajar dan menanamkan pentingnya belajar sepanjang hayat kepada objek pemberdayaan.
- 2) *Peran diseminasi inovasi*, yaitu berperan menyebarluaskan informasi mengenai inovasi-inovasi di luar kepada objek yang di berdayakan.
- 3) *Peran fasilitasi*, yaitu memberikan pelayanan, kemudahan, serta bantuan dalam akses kebutuhan yang di butuhkan oleh objek pemberdayaan.
- 4) *Peran konsultasi*, yaitu sebagai penasehat dan pemberi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat.
- 5) *Peran advokasi*, yaitu memberikan bantuan kaitannya dengan pengambilan keputusan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
- 6) *Peran supervisi*, yaitu berperan sebagai penyelia pelaksanaan kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat.
- 7) *Peran monitoring dan evaluasi*, yaitu berperan dalam melakukan pengamatan, pengukuran, serta penilaian hasil dari proses pemberdayaan

²⁴ Totok Mardikanto dan Perwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: ALFABETA, 2017), hal. 140.

²⁵*Ibid.*, hal. 143.

yang dilakukan, baik pada saat sebelum pemberdayaan dilakukan, saat sedang dilakukan, dan setelah selesai dilakukan.

Dalam menjalankan peranannya sebagai instansi pelayanan publik, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki tugas dan wewenang. Secara umum, tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. Adapun Rincian Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu:²⁶

1. Merumuskan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah.
2. Mengoordinasikan dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.
4. Mengoordinasikan kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat.
5. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Sedangkan rangkaian Wewenang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain:²⁷

²⁶ <http://depkop.go.id/tentang-kementerian/sejarah-kementerian/.html>, di akses pada 29 April 2019

²⁷ *Ibid.*,

1. Menetapkan kebijakan di bidang KUKM untuk mendukung pembangunan secara makro.
2. Menetapkan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimum yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang KUKM.
3. Menyusun rencana nasional secara makro di bidang KUKM.
4. Membina dan mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang KUKM.
5. Mengatur penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang KUKM.
6. Menerapkan standar pemberian izin oleh daerah di bidang KUKM.
7. Menerapkan kebijakan sistem informasi nasional di bidang KUKM.
8. Menerapkan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang KUKM.
9. Menerapkan pedoman akuntansi koperasi dan pengusaha kecil menengah.
10. Menetapkan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi.
11. Memberikan dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem distribusi bagi KUKM.
12. Memberikan dukungan dan kemudahan dalam kerja sama antar KUKM serta kerja sama dengan badan lainnya.

D. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

Pengertian pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah pasal 1, bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara

sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro kecil menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”.²⁸

Sedangkan secara khusus pemberdayaan UMKM juga memiliki prinsip dan tujuan sebagaimana tercantum Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, prinsip pemberdayaan UMKM antara lain:²⁹

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan politik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
4. Peningkatan daya saing UMKM, dan
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan UMKM menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil antara lain:³⁰

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

4. ²⁸ *Undang-undang UMKM (UU RI No. 20 Tahun 2008)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.

²⁹ *Ibid.*, hal. 7-8.

³⁰ *Ibid.*, hal. 8.

3. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Fahmi Radhi mengemukakan secara garis besar, terdapat kebijakan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan UMKM, antara lain:³¹

1. Menciptakan iklim usaha kondusif bagi UMKM sehingga mampu mendorong pengembangan UMKM secara mandiri dan berkelanjutan.
2. Mendorong terbentuknya lembaga keuangan yang mampu memobilisasi dana masyarakat sekaligus menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kegiatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan UMKM.
3. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan usaha.

Secara umum sektor UMKM memiliki karakteristik sebagai usaha yang tergolong dalam ekonomi lemah, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, teknologi yang digunakan, permodalan, pemasaran, promosi, maupun tingkat kerja sama. Oleh karena itu usaha mikro kecil menengah perlu di berdayakan agar mampu bersaing dan mandiri.

Pemerintah sebagai salah satu agen pemberdayaan memiliki peran yang penting dalam pengembangan sektor UMKM. Dalam proses pemberdayaan, pemerintah berada pada posisi penyuluh atau fasilitator pemberdayaan. Upaya pemerintah sebagai fasilitator pemberdayaan banyak sekali mulai dari pembentukan kebijakan-kebijakan, menyiapkan bantuan modal, fasilitasi dan

³¹ Fahmi Radhi, *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat*, (Jakarta: Republika, 2008), hal. 192.

pelayanan, berbagai bentuk pembinaan dan pelatihan, serta pendampingan usaha.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai adalah satu instansi pemerintah yang berwenang menangani bidang UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan sektor UMKM. Upaya pemberdayaan yang umum digunakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai lembaga non profit yakni dengan memberikan pendampingan usaha.

1. Pendampingan Usaha

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pendampingan sosial menjadi satu strategi penting dalam menentukan keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat. Strategi pendampingan ini diperlukan bagi agen pemberdayaan yang tugasnya hanya sebagai fasilitator, dinamisator, dan pembimbing masyarakat di lapangan.

Dalam memberdayakan masyarakat terdapat proses dan tindakan sosial di mana masyarakat diharuskan mampu untuk memecahkan masalah yang di hadapi atau memenuhi kebutuhan sosialnya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Merujuk pada Payne sebagaimana diungkapkan Suharto bahwa prinsip utama pendampingan sosial adalah “*making the best of the client’s resources*”.³² Hal ini berarti

³²Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hal. 94.

para agen pemberdayaan sebagai pendamping memiliki tugas penting dalam proses pendampingan.

Suharto menyampaikan pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang biasa disebut 4P, yakni: pemungkinan atau fasilitasi, penguatan, perlindungan, dan pendukung, antara lain:³³

- a. Pemungkinan, fungsi ini berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Tugas pendamping dalam fungsi ini antara lain memobilisasi dan mengkoordinasi sumber-sumber agar mampu dijangkau oleh masyarakat.
- b. Penguatan, fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat. Pendamping harus mampu membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, serta menyelenggarakan pelatihan.
- c. Perlindungan, berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Pendamping bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Fungsi ini juga berarti bahwa pendamping bisa dijadikan sebagai konsultan, yakni sebagai orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.

³³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hal. 95-97

- d. Pendukungan, mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pada fungsi ini pendamping dituntut untuk mampu melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Selain tugas dan fungsi yang ada dalam pendampingan sosial, selanjutnya Suharto juga mengemukakan lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan kegiatan pendampingan sosial, antara lain:³⁴

- a. Memberikan motivasi. Pemberian motivasi terhadap objek pemberdayaan perlu dilakukan, di mana motivasi dilakukan agar mereka dapat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki.
- b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pemberian pendidikan dasar. Sedangkan masalah keterampilan bisa dikembangkan melalui pemberian pelatihan-pelatihan serta cara-cara partisipatif lainnya.
- c. Manajemen diri. Pada tahap awal pembentukan manajemen diri, pendamping dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan sebuah sistem. Selanjutnya masyarakat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistemnya sendiri.

³⁴ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hal. 99-100.

- d. Mobilisasi sumber. Metode ini digunakan untuk menghimpun setiap sumber-sumber yang dimiliki oleh individu-individu yang dalam masyarakat melalui tabungan dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial.
- e. Pembangunan dan pengembangan jejaring. Pengembangan jaringan sangat penting dilakukan guna menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang penting dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Monitoring dan evaluasi atau yang biasa disebut *monev*, digunakan sebagai strategi dalam mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi program sosial yang diberikan.

Pengertian dari Monitoring sendiri yaitu kegiatan pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan. Di dalam Monitoring terdapat proses pengumpulan informasi mengenai apa yang terjadi selama proses penerapan program. Kegiatan Monitoring dapat dilakukan dengan mengikuti langsung kegiatan maupun membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan.³⁵

³⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hal. 118.

Sedangkan evaluasi adalah mengukur berhasil tidaknya program yang dilaksanakan, apa yang menjadi sebab keberhasilan maupun kegagalan, serta tindak lanjut dari hasil program. Menurut Marjuki dan Suharto bahwa kegiatan evaluasi senantiasa didasarkan atas hasil Monitoring.³⁶

Prinsip *monev* kaitannya dengan program sosial adalah untuk meningkatkan pengambilan keputusan seperti, strategi apa yang akan diterapkan, program apa yang sesuai, sasaran yang akan menerima pelayanan, dan lain sebagainya. Menurut Owen dan Rongers yang dikutip Suharto, ada lima objek atau sasaran yang dapat dijadikan bahan *monev*, antara lain:³⁷

- a. Program, yaitu seperangkat kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu perubahan tertentu terhadap kelompok sasaran tertentu.
- b. Kebijakan, ketetapan yang memuat prinsip-prinsip dalam bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten.
- c. Organisasi, yakni sekumpulan orang yang bersepakat melakukan kegiatan tertentu demi mencapai tujuan tertentu.
- d. Produk atau hasil, yaitu *output* yang dihasilkan dari suatu proses kegiatan tertentu.
- e. Individu, yakni seseorang yang terdapat dalam suatu organisasi di masyarakat.

³⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hal. 118.

³⁷ *Ibid.*, hal. 120.

E. Penelitian Terdahulu

Diperlukannya penelitian terdahulu ini guna menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian, sehingga dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, dan Ainul Hayat yang berjudul *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)*.³⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal pada kelompok usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan untuk mengetahui serta menganalisis kendala dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada kelompok usaha “Emping Jagung”. Hasil dari penelitian ini yaitu pengembangan secara internal dari kelompok usaha “Emping Jagung” dalam meningkatkan potensi dilakukan dengan

³⁸ Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, dan Ainul Hayat, *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 1, No 6 dalam <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/195>.

menggunakan modal awal dari tabungan sendiri, melakukan inovasi untuk hasil produksinya, memperluas jaringan pemasaran, dan melengkapi sarana dan prasarana usahanya. Selain itu, pengembangan juga dilakukan dengan fasilitasi dari pihak eksternal yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan, mengadakan pembinaan dan pelatihan, kegiatan promosi produk, memperluas pemasaran produk, serta menyediakan sarana dan prasarana. Namun beberapa pengusaha mengalami kendala dengan meningkatnya harga bahan baku, keterbatasan sumber daya manusia, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya akses pemasaran produk. **Persamaan** penelitian ini dengan penelitian dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai upaya yang dilakukan pemerintah terkait dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah. Selain itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini juga sama yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. **Perbedaannya** yakni dalam penelitian ini juga dibahas mengenai upaya internal yang dilakukan kelompok usaha itu sendiri dalam pengembangan usahanya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi, Abdul Juli Andi Gani, dan Abdullah Said yang berjudul *Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UKM Kota Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)*.³⁹ Tujuan dari penelitian ini adalah

³⁹Hesti Kusuma Wardani, Ambar Pertiwi, Abdul Juli Andi Gani, dan Abdullah Said yang berjudul *Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UKM Kota Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 1, No 2 dalam <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/48>.

untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan UKM serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa dirasa pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang masih belum berjalan maksimal dan merata karena pemberdayaan lebih berfokus pada UKM yang tergabung dalam Paguyuban Amangtiwi sedangkan UKM yang tidak tergabung dalam Paguyuban seperti terabaikan. Sementara itu, faktor yang menjadi pendukung dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UKM adalah adanya struktur organisasi yang terintegrasi pada Dinas Koperasi dan UKM, adanya paguyuban Amangtiwi yang menaungi UKM, kesadaran pelaku UKM untuk bergabung dengan Paguyuban Amangtiwi, pembentukan Koperasi Amangtiwi, pemanfaatan teknologi *e-business*, dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Faktor penghambat dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UKM adalah keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang dimiliki, kesulitan permodalan UKM, dan permasalahan teknis UKM. **Persamaannya** yakni sama-sama menganalisis tentang upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memberdayakan UMKM serta mengenai faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan. Sedangkan **perbedaannya** yaitu dalam penelitian ini UKM yang diteliti merupakan suatu paguyuban, bukan perorangan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Robby Firmansyah, Ratih Nur Pratiwi, dan Riyanto dengan judul *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun*

(*Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*).⁴⁰ Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah Kabupaten Madiun dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya Di Sentra Industri Brem Desa Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun telah melaksanakan strategi-strategi, antara lain: 1) Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial, 2) Pengembangan Pemasaran, 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia, 4) Strategi pengaturan dan pengendalian. **Persamaan** penelitian ini dengan rancangan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas terkait. Sedangkan **perbedaannya** yaitu dalam penelitian ini UKM yang diteliti yaitu sentra, bukan perorangan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yesy Yusro Kumalasari, Agus Suryono, dan Mochamad Rozikin yang berjudul *Pembinaan dan Pemberdayaan Pengrajin Batik (Studi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kab. Sidoarjo dan Industri Kecil Kampoeng Batik*

⁴⁰ Robby Firmansyah, Ratih Nur Pratiwi, dan Riyanto dengan judul *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 2, No 1 dalam <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/356>.

Jetis Kab. Sidoarjo).⁴¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pembinaan dan pemberdayaan pengrajin batik yang ada di Kampong Batik Jetis yang dilakukan oleh Diskoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu dalam upaya pemberdayaan pengrajin batik, strategi yang dilakukan oleh dinas koperasi antara lain; fasilitasi akses permodalan dan fasilitasi pemasaran. Fasilitasi akses permodalan dilakukan dengan cara bekerja sama dengan beberapa perbankan guna memberikan akses pinjaman sebagai modal. Sedangkan dalam hal pemasaran yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pameran – pameran, promosi, dan misi dagang. **Persamaan** penelitian ini dengan rencana penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan sektor UMKM yang dilakukan oleh dinas terkait, yang membedakan hanyalah sampel penelitian yang diambil yakni dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah pelaku usaha pengrajin batik, sedangkan dalam rencana penelitian ini saya memilih pengusaha keripik gadung.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Bagus Ferdiansyah, Bambang Santoso Haryono, dan Muhammad Shobaruddin yang berjudul *Pemberdayaan Ekonomi Pengusaha Tahu (Studi tentang Pemberdayaan pengusaha tahu melalui peran dinas koperasi, industri, perdagangan Kab.*

⁴¹ Yesy Yusro Kumalasari, Agus Suryono, dan Mochamad Rozikin, *Pembinaan dan Pemberdayaan Pengrajin Batik (Studi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kab. Sidoarjo dan Industri Kecil Kampong Batik Jetis Kab. Sidoarjo)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 2, No dalam administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/338.

Kediri).⁴² Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh Diskoperindag dalam pemberdayaan ekonomi pengusaha tahu yang ada di Kediri, selain itu juga untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat proses pemberdayaan yang dilakukan Diskoperindag. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Diskoperindag menerapkan beberapa strategi antara lain: akses permodalan, pembinaan, dan pengawasan. **Persamaan** penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai upaya pemberdayaan pelaku usaha (UMKM), yang membedakan yakni dalam penelitian ini pemberdayaan yang dimaksud difokuskan kepada pemberdayaan pengusaha tahu.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Edy Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo yang berjudul *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.⁴³ Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun strategi yang operasional dan tepat untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Metode analisis yang digunakan adalah

⁴² Muhamad Bagus Ferdiansyah, Bambang Santoso Haryono, dan Muhammad Shobaruddin, *Pemberdayaan Ekonomi Pengusaha Tahu (Studi tentang Pemberdayaan pengusaha tahu melalui peran dinas koperasi, industri, perdagangan Kab. Kediri*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 4, No 12 dalam <https://www.neliti.com/id/publications/83108/pemberdayaan-ekonomi-pengusaha-tahu-studi-tentang-pemberdayaan-pengusaha-tahu-me>.

⁴³ Edy Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12 No. 1 dalam <https://www.researchgate.net/publication/314108962>.

pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu diperoleh beberapa masalah yang dihadapi oleh UMKM di Provinsi DIY, antara lain: pemasaran, modal, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, pemakaian bahan baku, peralatan produksi, penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, serta kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal. Sedangkan strategi yang diterapkan meliputi: (1) Berbagai pelatihan dalam pengembangan produk yang lebih variatif dan berbasis sumber daya lokal; (2) Dukungan pemerintah pada pengembangan proses produksi dengan revitalisasi mesin dan peralatan yang lebih modern; (3) Pengembangan produk yang berdaya saing tinggi; (4) Kebijakan kredit oleh perbankan dengan bunga lebih murah dan sederhana; (5) Peningkatan kualitas infrastruktur fisik maupun nonfisik untuk menurunkan biaya distribusi; (6) Dukungan kebijakan pengembangan promosi ke pasar ekspor maupun domestik dengan berbagai media yang lebih modern dan bervariasi. **Persamaan** penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh dinas terkait. **Perbedaannya** yaitu lokasi penelitian ini terletak di Yogyakarta sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Kediri. Selain itu dalam penelitian ini UMKM dimaksudkan secara umum, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan satu UMKM sebagai sampel yaitu usaha keripik gadung Margomulyo.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Fathatur Rohmah, Tjahjanulin Domai, Sukanto dengan judul *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Olahan Mangga (Studi pada*

Sentra Olahan Mangga Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo).⁴⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan strategi Pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dalam pemberdayaan UMKM olahan mangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini yakni Strategi pemerintah daerah yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain adalah pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi permodalan, perluasan akses pasar, kemudahan dalam perizinan. Faktor pendukung dalam pemberdayaan adalah dukungan dana dari pemerintah dan klinik konsultasi bisnis untuk UMKM, sedangkan faktor penghambat adalah bahan baku musiman dan kualitas sumber daya manusia yang kurang. **Persamaannya** dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan dinas terkait. **Perbedaannya** yaitu lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Probolinggo, sedangkan penelitian penulis terletak di Kabupaten Kediri.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Elin Prasetyo Rini, Ratih Nur Pratiwi, Romula Adiono, yang berjudul *Strategi Menciptakan Iklim UKM Pada Industri Kreatif Batik Tulis (Studi pada Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Kediri)*.⁴⁵ tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan,

⁴⁴ Fathatur Rohmah, Tjahjanulin Domai, Sukanto, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Olahan Mangga (Studi pada Sentra Olahan Mangga Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo)*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 dalam administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/338.

⁴⁵ Elin Prasetyo Rini dkk, *Strategi Menciptakan Iklim UKM Pada Industri Kreatif Batik Tulis (Studi pada Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Kediri)*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 dalam administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id.

menganalisis dan menginterpretasikan upaya yang dilakukan Diskoperindag dalam menciptakan iklim usaha bagi UMKM . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini diketahui strategi yang dilakukan oleh Diskoperindag antara lain; memberikan kredit dana bergulir, fasilitas pemasaran melalui “SANRI”, memperluas jaringan pemasaran, pengembangan skala usaha melalui kemitraan, dan peningkatan akses teknologi, memberikan pelatihan kepada perajin batik tulis dan masyarakat umum. **Persamaan** penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang strategi guna mengembangkan UMKM yang dilakukan oleh dinas terkait serta lokasi penelitian. **Perbedaannya** yaitu terletak pada UMKM yang diteliti, dalam penelitian ini UMKM yang digunakan sebagai sampel adalah sentra batik, sedangkan dalam penelitian penulis adalah olahan makanan, selain itu penelitian ini juga lebih fokus ke penciptaan iklim usaha saja.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Nila Kurnia Wati, Choirul Saleh, Abdul Wachid yang berjudul *Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Apel Berbasis Ekonomi Lokal (Studi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu)*.⁴⁶ Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang dilakukan dalam pengembangan industri pengolahan apel di Kota Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian

⁴⁶ Nila Kurnia Wati, Choirul Saleh, Abdul Wachid, *Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Apel Berbasis Ekonomi Lokal (Studi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu)*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 dalam administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id.

ini yaitu Strategi tersebut di wujudkan ke dalam beberapa program, namun sayangnya beberapa program yang dilaksanakan masih kurang optimal dalam pelaksanaannya. Seperti program peningkatan kualitas dan standarisasi produk melalui pemberian fasilitasi label halal dan izin dari dinas kesehatan di mana kualitas bahan baku masih belum dapat menjamin kualitas produk. Dalam program pendampingan teknologi pelaksanaannya juga masih belum optimal karena adanya keterbatasan teknologi. Serta dalam penyelenggaraan even pameran keterbatasan tempat juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang optimalnya program yang dilaksanakan pemerintah tersebut karena hanya industri tertentu yang dapat mengikuti even pameran tersebut. **Persamaannya** yaitu sama-sama meneliti tentang strategi guna mengembangkan usaha. **Perbedaannya** yaitu pada penelitian ini usaha yang diteliti adalah industri.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin M. Adam, Patar Rumapea, Wehelmina Rumawas yang berjudul *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Ternate (Studi Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate)*.⁴⁷ Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi UMKM di Kota Ternate, serta upaya Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate dalam memberdayakan UMKM di Kota Ternate. Metode penelitian ini yang dipakai yakni tipe dan jenis penelitian, yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Kebijakan-kebijakan yang

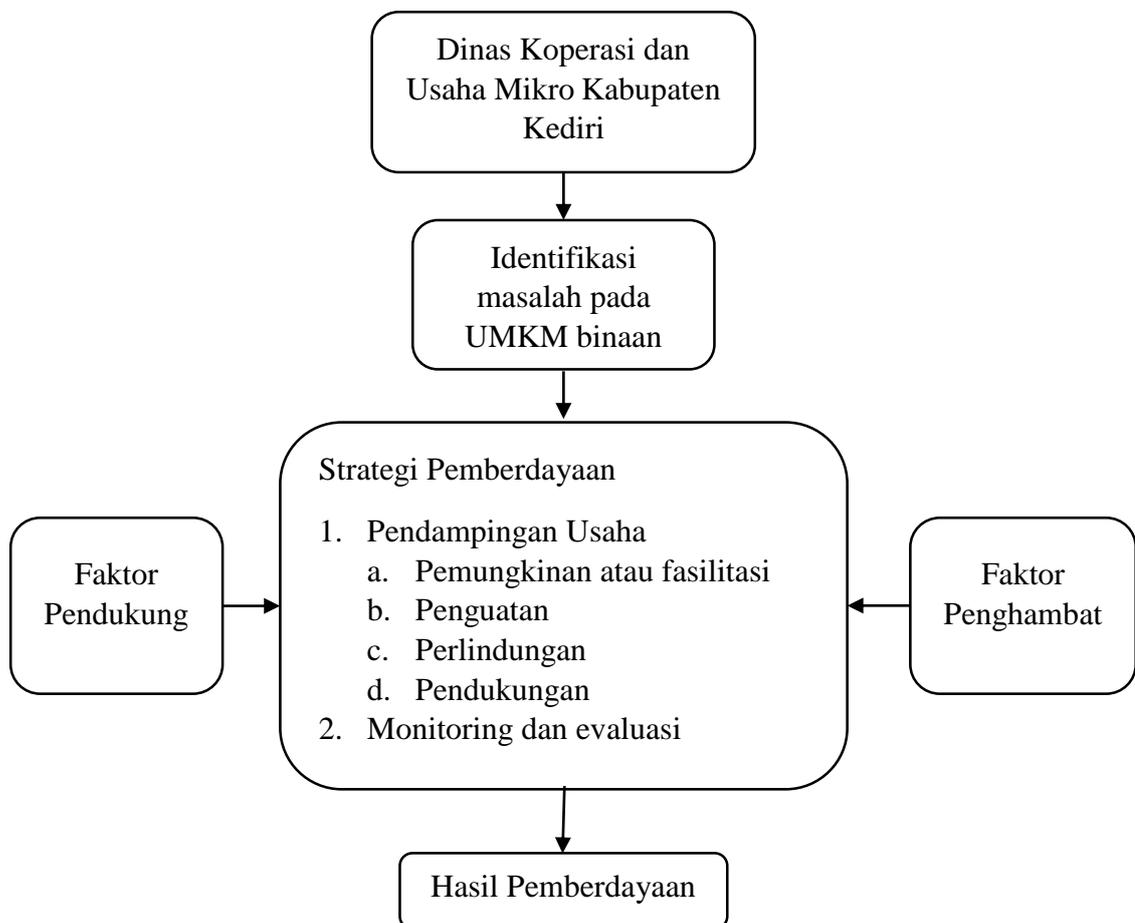
⁴⁷ Syarifuddin M. Adam, Patar Rumapea, Wehelmina Rumawas, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Ternate (Studi Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate)*, Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan ISSN : 2337 – 4004 dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/journalilmiahociety/article/view/12457>.

telah dibuat pemerintah kota Ternate di antaranya bimbingan serta pemberdayaan terhadap UMKM dan juga telah memfasilitasi produk-produk UMKM untuk memperoleh pengukuhan modal dari BUMN dan perbankan. **Persamaan** penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh dinas terkait. **Perbedaannya** yaitu lokasi penelitian ini terletak di Jota Ternate sedangkan penelitian yang penulis lakukan terletak di Kabupaten Kediri .

F. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Konseptual



Tahap awal penelitian dilakukan dengan pengumpulan data sekunder antara lain; data jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Kediri, data kegiatan-kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri seperti pelatihan dan pameran. Langkah selanjutnya mengambil satu sampel yakni salah satu UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri. Dari sampel tersebut maka akan di teliti dengan metode wawancara kepada pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri mengenai masalah-masalah yang dihadapi UMKM binaannya tersebut. Selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada pemilik usaha keripik gadung Margomulyo yaitu tentang masalah atau kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Penelitian juga dilanjutkan dengan meneliti tentang strategi atau upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam memberdayakan UMKM binaannya tersebut.

Tahap akhir penelitian ini yakni dengan meneliti hasil atau perkembangan dari usaha keripik gadung Margomulyo sebagai salah satu binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri yang telah mengikuti berbagai program pemberdayaan yang dicanangkan.